

**MASYARAKAT DAERAH ALIRAN SUNGAI CODE
DALAM MENANGGULANGI DAMPAK BENCANA
BANJIR**

**Oleh:
Ermawan Susanto
Staf Pengajar FIK UNY**

Abstract

This research aims at empowering DAS's (river flowing area) people at the village of Code Jetis, Yogyakarta in covering flood disaster and in giving assistance of flood disaster emergency.

The design of research uses qualitative descriptive design which is done by using survey method. The method of data collection uses data triangulation which consists of: (1) Focus group discussion of local people (3 citizens), and (2) non participant observation in DAS setting at Code. Subject of research that is used here is people at DAS of Code which consists of young people or public figure and expert as facilitators where live at Jogoyudan, Gondolayu, Gedongtengen, and Gowongan. Instrument of research is the researcher which is in this case helped by theme list that has prepared. The theme list is prepared by research team before FGD even. Data at FGD is recorded using audio tape and transmitted. Non-participant Data was notes on field-notes. The first Data analytic is data reduction, when transcript notes and field-notes reduced due the first topic and appear topic during taking of data. Furthermore, the process are data reconstruction and analisis thematic.

The result of FGD process did doing for two groups until second group, then not found of new topics til the topic was same. The people live in Jetis said that antisipation and victim handling especially overflow is more benefit. Although some people was complication to knowing victim handling for drowning and near drowning because that knowledge is not enough.

Keywords: empowering, commucity potency, flood diasarter, FGD.

PENDAHULUAN

Indonesia terletak pada sabuk dunia yang kaya-raya dan indah menawan, namun di balik itu sekaligus rawan bencana alam. Oleh sebab itu rakyatnya harus dipersiapkan untuk menyesuaikan diri dan dapat menyikapi keadaan tersebut dengan bijak. Penciptaan sistem penanganan bencana yang tepat merupakan salah satu usaha yang harus ditempuh dalam kerangka antisipasi. Dengan langkah itu, korban dan kerugian karena dampak diharapkan dapat ditekan seminim mungkin bila suatu saat terjadi bencana. Hal ini mendapatkan perhatian serius dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB). Berdasarkan urutan waktu kejadian, kegiatan penanganan bencana dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, sebelum terjadi bencana diperlukan penanganan tentang kewaspadaan dan sistem peringatan dini. *Kedua*, pada saat kejadian bencana, penanganan berupa penanggulangan segera atau tanggap darurat, dan pasca bencana penanganan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. *Ketiga*, kelompok kegiatan itu memiliki peran penting masing-masing dalam menekan jumlah kerugian dan korban sebagai dampak bencana.

Sebagai kegiatan di urutan terdepan, kewaspadaan dan peringatan dini merupakan kegiatan yang sangat efektif dalam usaha menekan seminim mungkin kerugian dan korban dampak bencana, di samping ikut menentukan keberhasilan langkah-langkah berikutnya. Namun secara umum masyarakat belum memberikan perhatian yang semestinya bagi terciptanya kegiatan ini secara terpadu. Perhatian masyarakat hanya muncul secara sporadis di wilayah-wilayah tertentu yang memang telah beberapa kali terlanda bencana seperti di daerah **Balerante** (rawan bencana merapi), kawasan **Code** (rawan banjir) dan **Parangtritis** (rawan gelombang laut). Selama ini pemahaman masyarakat cenderung

membebankan seluruh tanggung jawab penanggulangan bencana, termasuk sistem kewaspadaan dan peringatan dini, pada pemerintah saja. Pemahaman ini memang benar karena menurut konstitusi keamanan rakyat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah, namun dengan mempertimbangkan segala keterpurukan negara dan bangsa pada saat ini, hal itu rasanya masih jauh dari harapan.

Karakter masyarakat khususnya di wilayah DIY dan sekitarnya yang masih guyub, komunikatif dan peduli sesungguhnya sangat mendukung pengembangan suatu sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat. Potensi tersebut perlu digali, digalang dan diarahkan menjadi suatu gerakan aksi terpadu yang nyata dan bermanfaat. Pengalaman warga Balerante, lembah Code, dan Parangtritis serta wilayah lain dalam menyelenggarakan sistem peringatan dini perlu dikembangkan ke seluruh wilayah lain, hingga terbentuk suatu jaringan sistem peringatan dini masyarakat yang terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder, antara lain narasumber informasi peringatan dini (BMG, BPPTK, Akademisi, dan sebagainya), aparat pemerintahan, dan elemen masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kawasan lembah Code merupakan daerah rawan bencana banjir yang mengancam kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu kiranya memberdayakan masyarakat lembah kali Code, yang diharapkan mampu mengakomodir dan mengatasi berbagai permasalahan dan fenomena bencana banjir di sekitar daerah aliran sungai.

Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Bencana

Bencana telah diartikan secara beraneka ragam, baik yang bersifat umum atau telah disesuaikan dengan “kepentingan” yang “mengartikan”. Bencana akan mengubah pola-pola kehidupan normal, merugikan manusia, merusak struktur sosial, mengakibatkan lonjakan kebutuhan, serta memberikan dampak buruk yang

berkepanjangan. Bencana bukan sekedar karena letusan gunungapi maupun gempa bumi. Bencana bisa muncul karena peristiwa alam (tanah longsor, banjir, kebakaran, gunung meletus, tsunami); perbuatan manusia (peperangan, kecelakaan industri, huru-hara); atau kombinasi keduanya (tanah longsor, banjir, kebakaran, kekeringan). Dipercaya bahwa resiko ancaman secara tiba-tiba maupun perlahan-lahan dapat berubah menjadi bencana jika kapasitas masyarakat di kawasan itu rendah.

Pengelolaan bencana (*disaster management*) secara harfiah merupakan “upaya penanggulangan bencana” yang muncul sebagai akibat (hasil) kolektif atas komponen ancaman (bahaya) dan kerawanan (kerentanan) yang secara bersama-sama berada di suatu wilayah itu. Pengelolaan dipahami sebagai suatu “siklus” yang terdiri dari: kejadian bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan, pencegahan, pengurangan dampak, dan kesiap-siagaan (ET Paripurno, 2008). Manajemen bencana adalah proses dinamis dan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui mekanisme eksternal dan internal. Mekanisme eksternal memobilisasi unsur di luar komunitas korban, dan menempatkan korban sebagai obyek. Mekanisme internal menempatkan komunitas sebagai pelaku utama dan sentral.

Sementara ini penanggulangan bencana di Indonesia cenderung menggunakan mekanisme eksternal. Boleh jadi penerapan mekanisme eksternal merupakan dampak politik yang menempatkan masyarakat pada posisi lemah, bodoh dan selalu salah. Sebaliknya, kekuatan, kepandaian dan kebenaran itu berada di pemerintah, atau orang di luar komunitas korban. Dominasi orang luar tersebut menjadikan program selalu “turun dari atas”. Program disiapkan lembaga-lembaga pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat. Mekanisme dengan dasar pemikiran bahwa komunitas korban tidak berdaya mendukung proses penghilangan partisipasi komunitas. Mekanisme ini mendudukkan masyarakat sebagai obyek; bukan “pemilik” program. Atas permasalahan-

permasalahan itu, masyarakat sudah tidak mampu memutuskan dan menangani.

Mekanisme internal menempatkan masyarakat tidak pada posisi lemah, bodoh dan salah. Tantangannya adalah, diperlukan pengalihan keterampilan penelitian dan perencanaan itu. Berbagai metoda pembelajaran dan aksi partisipatif merupakan salah satu pilihan pendekatan. Mekanisme ini dilandasi asas “keberdayaan”, yaitu kegiatan yang dibangun untuk masyarakat agar dapat mengembangkan kapasitasnya sendiri. Lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta dan organisasi non pemerintah (ornop) dapat mengambil peran dalam memulai membangun peningkatan kapasitas (sekaligus merupakan upaya mengurangi kerentanan). Selanjutnya, masyarakat dipersilakan menjadi subyek dari mekanisme manajemen penanggulangan bencana itu. Kewajiban kita dan negara ini membuat masyarakat yang rentan (karena tinggal di kawasan rawan bencana) menjadi lebih berkapasitas agar mereka mampu mengatasi resiko, sehingga ancaman tidak menjadi bencana (ET Paripurno, 2008).

Perencanaan partisipatif pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi tujuan dan menterjemahkan tujuan tersebut ke dalam kegiatan yang nyata/konkret dan spesifik. Perencanaan partisipatif akan diawali dengan kegiatan survai daerah rawah bencana, dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk memetakan kondisi fisik lingkungan dan sosial masyarakat. Untuk menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap hasil-hasil perencanaan, maka survai daerah bencana dilakukan oleh masyarakat dengan didampingi oleh fasilitator. Hasil dari pemetaan tersebut selanjutnya akan menghasilkan data tentang kebutuhan masyarakat yang kemudian diinventarisasikan untuk bidang tanggap bencana banjir sesuai dengan tujuan dan sasaran program.

Untuk menjamin bahwa perencanaan benar-benar dilakukan secara partisipatif, Fasilitator dibantu oleh Kader Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan perencanaan di masyarakat dengan

mempergunakan input data yang diperoleh dari survai daerah rawan bencana. Hasil dari perencanaan partisipatif tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Tindak. Hasil dari kegiatan penyusunan rencana tindak komunitas tersebut adalah disepakatinya visi dan misi tanggap bencana banjir di wilayah Pilot Projec. Pengertian masyarakat dalam pekerjaan ini adalah seluruh warga di lokasi sasaran yang setelah melalui proses pemberdayaan dapat menyadari dan memahami kondisi wilayahnya yang merupakan daerah rawan bencana banjir.

Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah sebagai berikut: (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kesadaran tinggi, (2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan, (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Manajemen Risiko Bencana

Permasalahan lingkungan” terus terjadi dari waktu ke waktu. Permasalahan lingkungan alamiah, mendadak maupun bertahap, hadir sebagai wujud dinamika bumi, misalnya gempa, letusan gunung api, tsunami, dan pasang-surut. Permasalahan lingkungan buatan umumnya berkembang menyertai proses pembangunan, misalnya pencemaran. Inipun dapat terjadi secara mendadak maupun bertahap. Persekutuan keduanya antara lain hadir sebagai banjir, gerakan tanah, banjir pasang surut, kekeringan, kebakaran. Permasalahan lingkungan buatan terjadi karena manusia melakukan penyimpangan dalam mengelola sumberdaya, terutama karena pemanfaatan berlebihan atasnya. Hal

ini terjadi karena pengelolaan sumberdaya alam cenderung berorientasi pada hasil dengan asas manfaat, yang mengabaikan dimensi ruang dan waktu. Pola pengelolaan sumberdaya semacam ini menimbulkan dampak yang dirasakan masyarakat secara langsung. Di sisi lain kesadaran lingkungan cenderung belum dimiliki, sehingga langkah-langkah perlindungan lingkungan untuk kehidupan yang baik masih lemah.

Saat ini mengelola sumberdaya alam dipahami (oleh sebagian besar orang) sebagai usaha-usaha memanfaatkan alam, yang dikelola dengan *prinsip dagang*: mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan modal sesedikit mungkin. Mengelola sumberdaya alam dipahami juga (oleh sedikit orang) sebagai melakukan usaha-usaha memanfaatkan alam agar dapat menjadi sumberdaya (sumber hidup) berkelanjutan. Tindakan ini dikenal dengan *prinsip konservasi*: pemanfaatan lestari. Prinsip inilah yang juga digunakan peternak sapi perah: mendapatkan uang dari menjual susu, bukan menjual sapi. Namun ternyata pendekatan ini masih memunculkan resiko buatan yang menambah beban resiko alamiah.

Ternyata pengelolaan sumberdaya alam menghasilkan manfaat sekaligus resiko secara bersamaan. Selama ini pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan cenderung berorientasi pada manfaat. Di sisi lain, resiko dikesampingkan dan tidak diperhatikan? Padahal pengesampingan resiko akan memperbesar resiko itu sendiri; yang pada akhirnya akan mengurangi nilai manfaat. Pada banyak kasus, dengan konteks ruang dan waktunya berbeda, nilai manfaat yang didapat jauh lebih kecil dibanding resiko yang diterima. Untuk menghindari itu semua, mengapa dalam mengelola sumberdaya alam tidak diberlakukan sebagaimana mengelola resiko? Manajemen resiko ini penting mengingat masyarakat cenderung memahami batas-batas manfaat, tetapi kurang memahami batas-batas resiko. Untuk itu ada tawaran lebih baik: mengubah perspektif mengelola sumberdaya; dari “manajemen

dagang” maupun “manajemen konservasi” menjadi perpektif “manajemen resiko”. Perpektif ini melihat sumberdaya bukan sekedar manfaat, tetapi juga “menempel” resiko di dalamnya.

Dalam perspektif manajemen resiko/bencana, dipahami bahwa bencana atau resiko muncul karena berpadunya ancaman dan kerentanan. Dengan pemahaman ini, resiko tidak akan menjadi bencana pada masyarakat dengan kapasitas tinggi atau yang tidak memiliki kerentanan. Dengan kata lain, bencana tidak akan terjadi apabila masyarakat mempunyai kapasitas untuk “mengelola” ancaman/resiko. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi gagasan dan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga mampu mengelola resiko, yakni menanggulangi bencana, mengurangi dampak dan mempunyai kesiapan menghindari resiko. Menurut Spengler (2001: 12), manajemen risiko patut diterapkan dan dikembangkan dan merupakan salah satu langkah preventif dalam aktivitas akuatik.

Sesuai catatan *Committee on injury, violence and poison prevention, American Academy of Pediatrics*, di negara maju seperti Amerika Serikat, 15% dari anak sekolah mempunyai risiko meninggal akibat tenggelam dalam air. Ini dihubungkan dengan perubahan musim. Pada musim panas anak-anak lebih tertarik bermain di kolam renang, danau, sungai, dan laut karena mereka menganggap bermain air sama dengan santai sehingga mereka lupa terhadap tindakan pengamanan. Kejadian hampir tenggelam (*near drowning*), 40% terjadi pada sebagian besar anak laki-laki untuk semua kelompok usia dan umumnya terjadi karena kurang atau tidak adanya pengawasan orangtua dan orang yang lebih dewasa (Hutchison JS, 1997: 232-9). Sebagai contoh dari Palmer (2005: 64), data yang dikumpulkan dari *American Foundation for Aquatic Injury Prevention* sepanjang tahun 2005, menyebutkan bahwa 70% korban tenggelam kemudian meninggal, karena tidak adanya pengawasan (*life guard*) dan waktu tenggelam yang melebihi 5 menit. Sedangkan 90–95% korban tenggelam di hampir semua

tempat, secara umum karena tidak adanya *life guard*. Dengan adanya keberadaan *life guard*, mampu menekan angka kematian karena tenggelam di sungai sampai tinggal menjadi 40% pada tahun berikutnya.

Cara Memegang dan Membawa Korban Tenggelam

Setidaknya ada tindakan preventif apabila terjadi kecelakaan di air seperti tenggelam misalnya. Terdapat beberapa sikap renang dari penolong yang selalu disesuaikan dengan cara memegang korban. Sikap renang tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pegangan pada rambut, dilakukan dengan satu tangan, apabila pegangan dilakukan dengan tangan kiri, maka si penolong berada di sebelah kiri korban. Gaya renang yang digunakan adalah gaya dada atau gaya bebas menyamping. Usahakan posisi korban tubuhnya terlentang, sehingga mulut dan hidungnya tetap berada di atas permukaan air, pegangan pada rambut sangat sulit dilakukan kecuali keadaan korban pingsan. (2) Pegangan pada pelipis, dilakukan dengan pegangan dua tangan, apabila penolong sudah berada di belakang korban, segera pegang pelipisnya dengan dua tangan, kemudian dibawa ke tepi kolam dengan menggunakan gaya dada dalam posisi terlentang. Usahakan mulut dan hidung korban selalu berada di atas permukaan air. Cara menolong dengan pegangan pada pelipis korban lebih efisien dan efektif dari pada pegangan pada rambut. (3) Pegangan pada dagu, dilakukan dengan dua tangan memegang dagu korban dan dibawa ke tepi kolam dengan gerakan gaya dada terlentang. Cara menolong korban dengan pegangan pada dagu keuntungannya sama dengan seperti pada pegangan pelipis. (4) Pegangan pada dada, dilakukan dengan cara merangkul dada korban dengan satu tangan. Cara menolong ini kurang efisien karena banyak menghabiskan tenaga dan sangat sulit jika korbannya tidak tenang. Selain itu terdapat beberapa alat bantu yang bisa dipakai dalam menolong korban tenggelam antara lain: (1) Tongkat, (2) Tambang Plastik, (3) Ban, (4) Pelampung.

Cara Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran tentang persepsi warga tentang tingkat ketepatan penanggulangan bencana banjir. Metode pengumpulan data kualitatif yang dipergunakan adalah metode triangulasi data yang terdiri dari: (1) *Focus group discussion* (FGD) pada warga (3 orang/kampung), (2) Observasi *non-participant* pada *setting* DAS *Code*. Subyek penelitian ini adalah warga sekitar daerah aliran sungai *Code* Kelurahan Jetis meliputi kampung Jogoyudan, Gondolayu, Gedongtengen, dan Gowongan yang terdiri dari unsur pemuda-pemudi atau tokoh masyarakat dan ahli sebagai fasilitator. Pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri yang dalam hal ini dibantu dengan daftar tema (*theme list*) yang telah disiapkan. Daftar tema tersebut dipersiapkan oleh tim peneliti sebelum pelaksanaan FGD. Data pada FGD direkam dengan memepergunakan *audio tape* kemudian ditranskrip. Data hasil observasi pada observasi *non-participant* dicatat dalam catatan lapangan (*field-notes*). Proses pertama analisis data adalah *data reduction* dimana hasil transkrip data FGD serta catatan lapangan pada observasi direduksi kemudian dipilah berdasarkan daftar tema awal dan tema yang muncul pada saat pengambilan data. Proses selanjutnya adalah *data reconstruction* dan *analisis thematic*. Analisis *thematic* dilakukan dengan berulang kali membaca hasil transkrip, membandingkan dan mengkontraskan data yang diperoleh dari semua responden pada satu tema dan antar tema dengan mempergunakan *bubbling technique*. Pada tahap akhir ditarik kesimpulan terakhir tentang bagaimana hubungan antara satu tema dengan tema yang lain pada keseluruhan responden serta inventarisasi semua temuan-temuan penting.

PEMBAHASAN

Subyek penelitian ini adalah warga sekitar daerah aliran sungai Code Kelurahan Jetis meliputi kampung Jogoyudan, Gondolayu, Gedongtengen, dan Gowongan yang terdiri dari unsur pemuda-pemudi atau tokoh masyarakat dan ahli sebagai fasilitator. FGD dilakukan pada dua kelompok, masing-masing beranggotakan 3 orang. FGD pada kelompok I dilakukan pada tanggal 20 September 2009 sedangkan FGD pada Kelompok II dilakukan pada tanggal 27 September 2009. FGD pada masing-masing kelompok dilakukan kurang lebih selama 30 menit. FGD dilakukan di kampus FIK UNY dengan mengundang peserta. Pada awal FGD, fasilitator mengemukakan bahwa identitas semua responden dilindungi dan responden diharapkan dapat secara bebas menyampaikan apa pendapatnya. FGD dilakukan pada dua kelompok karena ditemukan pada kelompok ke-2 tidak ditemukan tema-tema baru sehingga disimpulkan sudah terdapat saturasi tema (tema sudah sama). Rentang usia adalah 20 sampai dengan 40 tahun. Kedua kelompok tinggal di DAS Code lebih dari 5 tahun. Adapun daftar tema (*theme list*) dalam FGD antara lain:

Pendahuluan:

Perkenalan = tim peneliti dari fakultas untuk pemberdayaan masyarakat Code.

Tujuan diskusi = mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk tujuan penanggulangan banjir)

Informasi tambahan= semua responden dijamin kerahasiaannya

Persepsi warga tentang tingkat ketepatan penanggulangan bencana banjir?

Apakah warga di daerah ini sudah terbiasa mengalami banjir (terutama di musim penghujan)?

Apakah sudah pernah ada penyuluhan kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir?

Apakah sudah terbentuk kader masyarakat yang bertugas untuk menggerakkan masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir?

Bagaimana pengalaman anda dalam mengatasi bencana banjir?

Apakah menurut anda sarana dalam mengatasi penanggulangan banjir sudah optimal penggunaannya? (kalau belum, bagian apa yang belum optimal?)

Hal-hal apa saja yang menjadi kendala bagi anda dalam melaksanakan penanggulangan banjir ?

Persepsi warga tentang cara meningkatkan (optimalisasi) sarana penanggulangan bencana banjir di kawasan sungai Code?

Bagaimana saran anda agar sarana dan prasarana penanggulangan banjir yang sudah ada dapat ditingkatkan penggunaannya?

Pembahasan

FGD dilakukan pada dua kelompok, masing-masing beranggotakan 3 orang. FGD pada kelompok I dilakukan pada tanggal 20 September 2009 sedangkan FGD pada Kelompok II dilakukan pada tanggal 27 September 2009. FGD pada masing-masing kelompok dilakukan kurang lebih selama 30 menit. FGD dilakukan di kampus FIK UNY dengan mengundang peserta. Pada awal FGD, fasilitator mengemukakan bahwa identitas semua responden dilindungi dan responden diharapkan dapat secara bebas menyampaikan apa pendapatnya. FGD dilakukan pada dua kelompok karena ditemukan pada kelompok ke-2 tidak ditemukan tema-tema baru sehingga disimpulkan sudah terdapat saturasi tema (tema sudah sama). Rentang usia adalah 20 sampai dengan 40 tahun. Kedua kelompok tinggal di DAS Code lebih dari 5 tahun.

Teknik tema FGD dilakukan dengan tema terstruktur akan tetapi responden diperbolehkan untuk menambahkan tema-tema lain yang dianggap penting, relevan dan ingin diungkapkan

berkaitan dengan penanganan bencana banjir. Butir-butir temuan pada saat dilakukan FGD pada kedua kelompok meliputi:

Persepsi Warga terhadap Bencana Alam (Khususnya Banjir)

Warga merasa bahwa penanganan bencana khususnya banjir sangat bermanfaat. Mereka mengemukakan bahwa menolong korban tenggelam maupun hampir tenggelam sangat penting karena membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Mereka mengemukakan bahwa dengan penganggulan bencana banjir membantu mereka untuk lebih memahami tentang pentingnya antisipasi bencana. Beberapa pernyataan yang terungkap antara lain: Responden C pada kelompok I menyatakan:

“iya, menurut saya lebih baik ada yang membekali kami-kami ini dengan pelatihan renang menolong atau sejenisnya pak”

Responden B dari Kelompok II mengungkapkan hal yang senada:

” sebenarnya saya suka pak dengan menolong korban seperti itu karena bermanfaat bagi sesama,.....”

Di sisi lain, mereka juga menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk memahami cara-cara atau teknik renang menolong karena keterbatasan pengetahuan awal, ketiadaan buku-buku penunjang dan kurang mendapatkan pembimbingan maksimal dari LSM atau lembaga lainnya. Menanggapi peneliti yang megajak warga untuk belajar secara aktif dan mandiri, sebagian dari mereka merasa karena mereka terbiasa belajar secara otodidak dan karena alasan faktor sosial ekonomi. Walaupun demikian sebagian lainnya merasa tidak kesulitan untuk memenuhi anjuran untuk belajar mandiri. Berikut cuplikan komentarnya:

”..... Karena ya sosial ekonomi di kampung kami memang rendah, jadi tidak sampai berpikir untuk belajar renang apalagi renang menolong, kami otodidak saja”

Persepsi Warga tentang Fasilitas-fasilitas Pertolongan.

Sebagian besar warga menyatakan bahwa pada umumnya alat-alat yang menunjang penanganan korban banjir kurang memadai secara kuantitatif dan kualitatif.

Hal ini antara lain dinyatakan oleh responden D pada kelompok I:

“.....Kalau peralatan yang dimaksud belum ada pak, setahu kami cuma ban bekas itu saja...” “.....Ban, pelampung, tongkat.....”

Sedangkan untuk alat-alat yang lain warga mengeluhkan ketiadaan alat-alat tersebut.

Persepsi Warga tentang Penanganan Korban Banjir/Tenggelam.

Sebagian besar warga menyatakan bahwa mereka merasa tidak mengetahui cara-cara penanganan korban banjir atau tenggelam, apa saja yang wajib dilakukan apabila terjadi bencana banjir:

”.....Biasanya kalau korban meronta, dipukul sekalian biar pingsan agar mudah membawanya ke pinggir.....”

”.....menurut saya ditekan jantungnya atau dijungkirkan kepalanya berada di bawah, kakinya di atas.....”.

”.....Nanti kan airnya bisa keluar dari mulut.....”.

Kesimpulan:

Warga Kecamatan Jetis menyatakan bahwa antisipasi dan penanganan korban akibat bencana alam khususnya banjir sangat bermanfaat. Walaupun sebagian warga masih mengalami kesulitan untuk memahami cara-cara penanganan korban tenggelam atau hampir tenggelam dikarenakan pengetahuan yang dirasakan belum mencukupi. Hal yang selanjutnya dikeluhkan adalah ketiadaan alat-alat penanganan korban yang belum tersedia.

SIMPULAN

Warga Kecamatan Jetis menyatakan bahwa antisipasi dan penanganan korban akibat bencana alam khususnya banjir sangat bermanfaat. Walaupun sebagian warga masih mengalami kesulitan untuk memahami cara-cara penanganan korban tenggelam atau hampir tenggelam dikarenakan pengetahuan yang dirasakan belum mencukupi. Hal yang selanjutnya dikeluhkan adalah ketiadaan alat-alat penanganan korban yang belum tersedia.

Selanjutnya disarankan perlunya pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pendampingan untuk membangun kewaspadaan terhadap bencana banjir beserta cara-cara antisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- American Academic of Pediatric Commite on Injury and Poison Prevention Drowning. (1993). *Infant, Children, and Adolescents. Journal of Pediatrics*. Hal 292-294.
- Ambardini. (2008). *Pertolongan Pertama pada Korban Tenggelam*. Modul Pelatihan Dasar-dasar Keamanan Air bagi *Life Guard* di Provinsi DIY, 25 Agustus 2008.
- Barling *et al.* (2002). *Water Safety, Survival and Swimming Skills*. The Royal Life Saving Society-Australia.
- Clement A. (1997). *Legal Responsibility in Aquatics*. Aurora, OH: Sport and Law.
- Dougherty, Neil. J. (1990). *Risk Management in Aquatic. Journal of Physical Education, Recreation & Dance*; May 1990; 61, 5; ProQuest Education Journals pg. 46

- E.T Paripurno. (2008). *Politik Bumi dan Manajemen Bencana*.
Jurnal Dialog Kebijakan Publi. Edisi I/ Juni/ Tahun II/
2008.
- Hicks-Hughes D, Langendorfer S.(1986). *Aquatics for the Young
Child: a survey of Selected Program*. *National Aquatics
Journal*, pg 12-17.
- Palmer, Lynn. (2005). *Safe Swimming*. *Journal of Parks &
Recreation*; Feb 2005; 40, 2; ProQuest Education Journals
page. 64
- Spengler, J.O. (2001). *Planning for Emergencies in Aquatics*.
Journal of Physical Education, Recreation & Dance; Mar
2001; 72, 3; ProQuest Education Journals pg. 12.